

Pengaruh Investasi dan Belanja Modal terhadap Kapasitas Fiskal Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto sebagai Variabel Intervening

Risma Aprilya ^{1*}, Edi Jaenudin ²

^{1, 2} Universitas Padjadjaran, Indonesia

* risma22005@gmail.unpad.ac.id

Abstract

Urgensi dilakukan untuk menganalisis bagaimana investasi dan belanja modal memengaruhi kapasitas fiskal daerah melalui produk domestik regional bruto (PDRB) guna mendukung kemandirian dan efektivitas pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi dan belanja modal terhadap kapasitas fiskal baik secara langsung maupun melalui intervening PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal dan menggunakan data *pooled* berupa gabungan data *cross section*. Sampel penelitian ini adalah seluruh 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode pengamatan tahun 2019–2024 sehingga membentuk data panel (*pooled data*) yang merupakan kombinasi data lintas wilayah (*cross section*) dan runtut waktu (*time series*). Pemilihan sampel menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling). Jenis instrumen yang digunakan adalah instrumen dokumentasi berupa lembar pencatatan dan tabulasi data sekunder yang bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data laporan realisasi investasi, belanja modal, PDRB ADHK, dan kapasitas fiskal daerah yang telah dipublikasikan secara resmi oleh instansi terkait. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*) menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung investasi berpengaruh positif terhadap PDRB, belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah, belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah, dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Sementara pengaruh tidak langsung, PDRB tidak mampu memediasi pengaruh investasi terhadap kapasitas fiskal daerah dan PDRB tidak mampu memediasi pengaruh belanja modal terhadap kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

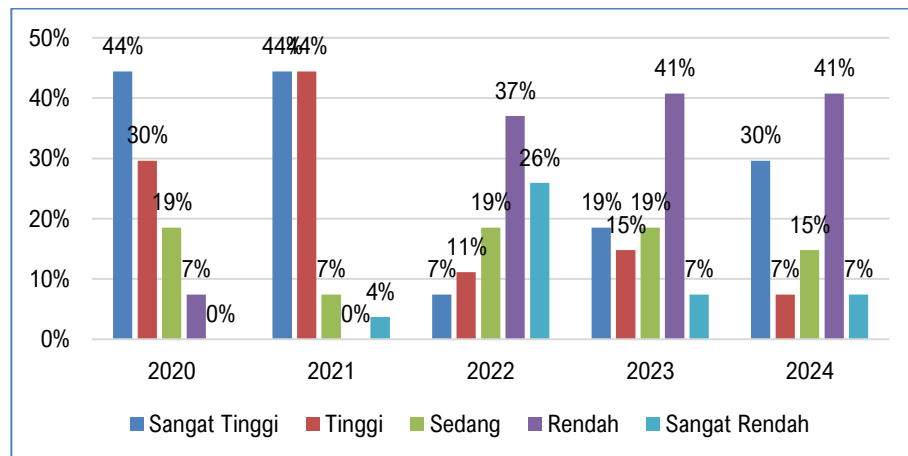
Keywords: *Investasi, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto, Kapasitas Fiskal Daerah.*

Pendahuluan

Kapasitas fiskal daerah merupakan gambaran kekuatan dalam menghimpun pendapatan suatu daerah berdasarkan sumber potensi penerimaan yang dimiliki oleh daerahnya (Herdiyana, 2019). Kapasitas fiskal daerah diukur dalam bentuk rasio sebagai dasar untuk mengelompokkan daerah ke dalam beberapa kategori bertingkat, mulai dari sangat tinggi hingga sangat rendah. Daerah dengan kategori kapasitas fiskal kuat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk membangun daerahnya (Panggabean et al., 2025). Sebaliknya, keterbatasan kapasitas fiskal dapat menghambat penyediaan infrastruktur dan pelayanan, memperbesar ketergantungan pada bantuan pusat, serta memengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Pada umumnya daerah yang memiliki proporsi PAD

atau DBH terhadap pendapatan tinggi memiliki Indeks KFD yang tinggi pula, sedangkan daerah dengan PAD rendah umumnya memiliki Indeks KFD rendah (Putri et al., 2026). Sehingga penguatan kapasitas fiskal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ada pada peningkatan PAD.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi yang dapat memperkuat KFD. Hal tersebut dikarenakan penduduk menjadi penunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi (Ernawati et al., 2025), sehingga menciptakan basis PAD yang besar. Namun, besarnya jumlah penduduk dan potensi penerimaan daerah tidak selalu diikuti oleh kapasitas fiskal yang kuat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1. Grafik KFD per kategori pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024

Sejak tahun 2020-2021, mayoritas Kabupaten/Kota berada pada kateori tinggi hingga sangat tinggi sebesar 74% pada tahun 2020 dan 88% pada 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam KFD, ditandai dengan bergesernya sebagian besar daerah ke kategori rendah dan sangat rendah dengan total 63%. Sementara kategori tinggi dan sangat tinggi menyusut menjadi hanya 18%. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang perlu segera diperbaiki mengingat Jawa Barat berpenduduk besar yang memerlukan kesiapan kapasitas fiskal untuk kepentingan pembiayaan layanan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemerintah daerah, fokus upaya perbaikan KFD adalah dengan penguatan PAD.

Berdasarkan literatur keuangan daerah, kapasitas fiskal merupakan cerminan skala ekonomi regional berupa produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB menjadi potensi pendapatan daerah sebagai basis ekonomi yang meningkatkan PAD. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan PDRB berpengaruh signifikan terhadap KFD (Istiningsih et al., 2022; Syaifullah, 2021). Namun penelitian lainnya menemukan pengaruh negatif signifikan PDRB terhadap KFD (Ernawati et al., 2025).

Penelitian terkait kapasitas fiskal juga telah mengeksplorasi faktor-faktor stimulus ekonomi berupa investasi. Dua jenis investasi telah diuji sebagai faktor pengaruh KFD, yaitu investasi dari sisi swasta berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta dari sisi pemerintah berupa belanja modal. Beberapa penelitian menunjukkan investasi dan belanja modal berpengaruh terhadap KFD (Ernawati et al., 2025; Simamora, 2025; Saparman et al., 2022). Sementara hasil lain menunjukkan tidak berpengaruh terhadap KFD (Reza et al., 2023; Saraswati et al., 2021). Namun di sisi lain, penelitian menunjukkan jalur berbeda, bahwa investasi dan belanja modal justru menunjukkan pengaruh yang positif terhadap PDRB, temuan ini menunjukkan hubungan inkonsisten antara variable stimulus ekonomi, PDRB, dan KFD (Christono et al., 2021; Rahayu et al., 2025).

Kondisi ini menimbulkan beberapa kesenjangan penelitian. Sebagian besar studi berfokus pada dampak langsung investasi dan belanja modal terhadap KFD, serta PDRB dijadikan sebagai variabel independen. Sementara beberapa penelitian justru menemukan stimulus ekonomi tersebut memengaruhi besaran PDRB. Sehingga penelitian ini mengeksplorasi pengaruh investasi dan belanja modal terhadap KFD baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mediasi PDRB.

Desentralisasi fiskal merupakan kerangka hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kajian fiskal federalisme, desentralisasi fiskal memiliki dasar teoritis kuat melalui konsep *Decentralization Theorem*. Teorema ini menyatakan dalam kondisi tanpa eksternalitas antar wilayah, tingkat kesejahteraan masyarakat lebih tinggi apabila penyediaan barang publik dilakukan oleh pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat karena preferensi terhadap informasi lokal lebih akurat.

Berdasarkan perspektif teori desentralisasi fiskal, implementasi kebijakan di Indonesia memberi kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola struktur anggaran melalui pengelolaan sumber daya keuangan di tingkat daerah. Daerah diberikan keleluasaan dalam hal pengelolaan sumber daya dan memiliki kendali dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur daerah (Suriadi et al., 2023). Penyerahan wewenang ini meningkatkan peran pemerintah daerah sebagai pengambil keputusan strategis yang diharapkan mampu membawa daerah ke arah yang lebih baik dalam menjalankan pemerintahan sesuai potensi ekonomi daerahnya.

Teori Pertumbuhan ekonomi neoklasik berkembang oleh Robert M. Solow tahun 1970 dan T.W. Swan tahun 1956. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. pertumbuhan Model Solow-Swan menggunakan unsur penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya *output* yang saling berinteraksi (Yunianto, 2021). Solow Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal.

Berdasarkan konteks pembangunan daerah, Teori Solow memberikan pemahaman bahwa arus investasi swasta yang masuk ke suatu wilayah tidak hanya berfungsi sebagai tambahan modal semata, tetapi juga sebagai stimulan bagi penyerapan tenaga kerja lokal. Pertemuan antara modal fisik dan sumber daya manusia ini memicu aktivitas penciptaan nilai tambah di berbagai sektor ekonomi. Teori Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes melalui karyanya berjudul *The general Theory of Employment, Interest and Money* pada tahun 1936. Keynes berpendapat bahwa perekonomian dapat mengalami kondisi kekurangan permintaan agregat yang menyebabkan penurunan *output* dan peningkatan pengangguran. Kondisi kekurangan permintaan agregat intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal termasuk belanja modal dan pendapatan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2016). Dengan demikian, fokus utama teori Keynesian terletak pada peran permintaan agregat sebagai penentu tingkat aktivitas ekonomi dan pendapatan nasional.

Mekanisme utama dalam teori ini adalah konsep efek pengganda atau *multiplier effect*. Keynes menjelaskan bahwa setiap unit mata uang yang dibelanjakan oleh pemerintah tidak hanya akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar nilai belanja tersebut, melainkan akan memicu serangkaian peningkatan pendapatan pada tahap-tahap berikutnya melalui aktivitas ekonomi yang berantai. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

Penanaman Modal, investasi diartikan sebagai kegiatan menanam modal dengan sumber dari dalam maupun luar negeri untuk mendapatkan dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Pengeluaran yang timbul akibat investasi mendorong terbentuknya serta bertambahnya berbagai komponen pendukung proses produksi, seperti pembangunan bangunan, pengadaan peralatan, dan peningkatan persediaan. Dengan demikian, keberadaan investasi berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi daerah yang menerima penanaman modal. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tersebut dijelaskan bahwa investasi di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran fiskal pemerintah daerah dalam rangka memperoleh atau menambah aset berupa aset tetap maupun lainnya yang manfaatnya dapat dipergunakan dalam waktu lebih dari satu tahun. Belanja modal merupakan instrumen penting yang berada di bawah kebijakan pemerintah daerah. Melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal, komponen pengeluaran pemerintahan, termasuk belanja modal, tercermin dalam APBD sebagai salah satu aspek untuk membuat ekonomi bertumbuh (Andriyansyah et al., 2019). PDRB menunjukkan ukuran nilai produksi barang dan jasa akhir secara keseluruhan yang dihasilkan oleh ekonomi wilayah tertentu pada suatu waktu, sehingga digunakan sebagai indikator kinerja ekonomi di daerah. Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa PDRB sebagai acuan kondisi perekonomian suatu daerah untuk mengamati kemajuan suatu daerah tersebut (Koerniawan et al., 2020). Hal tersebut sejalan dengan yang mendefinisikan PDRB sebagai jumlah *output* akhir berdasarkan yang ada pada unit ekonomi dalam wilayah tertentu untuk menjadi gambaran ekonomi wilayah (BPS, 2024).

Perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui dua cara yaitu atas dasar harga konstan (ADHK) dan atas dasar harga berlaku (ADHB). PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dengan perhitungan didasarkan pada tahun tertentu sebagai tahun dasar sehingga mampu menggambarkan pertumbuhan ekonomi dari suatu rentang periode tertentu. Sementara PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa dengan dasar harga setiap tahunnya sehingga dapat melihat bergesernya struktur ekonomi (BPS, 2024).

Konsep dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan setiap daerah yang dihitung berdasarkan penjumlahan pada komponen-komponen pendapatan daerah berupa PAD, dana dari sumber berupa transfer pusat maupun transfer antar daerah, serta sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, lalu hasil penjumlahan tersebut harus dikurangi dengan komponen-komponen pengeluaran tertentu yang sudah ditentukan penggunaannya meliputi alokasi terhadap belanja atau dana yang peruntukannya sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam PMK No. 65 Tahun 2024, nilai rasio kapasitas fiskal daerah diklasifikasikan menjadi lima kategori sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Rentang Rasio KFD	Kategori
$RKFD < 0,905$	Sangat Rendah
$0,905 \leq RKFD < 1,141$	Rendah
$1,141 \leq RKFD < 1,378$	Sedang
$1,378 \leq RKFD < 1,615$	Tinggi
$1,615 \leq RKFD$	Sangat Tinggi

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disusun dalam bentuk *pooled data* dengan kombinasi data lintas wilayah diperoleh dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan data runtut waktu untuk variabel independen berupa investasi dan belanja modal serta variabel intervening berupa produk domestik regional bruto menggunakan data periode 2019–2024, sedangkan variabel dependen menggunakan data pada rentang waktu 2020–2024, untuk mempertimbangkan *time lag* satu tahun. Sumber data diperoleh dari PMK tentang Kapasitas Fiskal Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, dan DJPK.

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Investasi (X1)	Sukirno (Abdulfatah & Mulyani, 2024) menjelaskan bahwa investasi adalah aktivitas pengalokasi untuk mendapatkan barang modal serta sarana produksi lainnya sebagai bentuk penanaman modal, dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.	Investasi = Ln (Jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri + Jumlah investasi Penanaman Modal Asing)	Rasio
Belanja Modal (X2)	Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh atau menambah aset tetap atau aset tetap lainnya yang manfaatnya akan dirasakan dalam waktu lebih dari satu tahun (PP No. 71 Tahun 2010).	Belanja Modal = Ln (Jumlah Realisasi Belanja Modal)	Rasio
PDRB (Z)	Produk domestik regional bruto adalah ukuran keseluruhan hasil barang dan jasa dari ekonomi suatu daerah yang berlangsung di wilayah tersebut dalam suatu periode (BPS, 2024).	PDRB = Ln (Jumlah PDRB ADHK)	Rasio
Kapasitas Fiskal Daerah	Kapasitas fiskal daerah adalah tingkat kemampuan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang diformulasikan dengan total penerimaan dan pembiayaan dikurangi pendapatan dan belanja yang peruntukannya sudah ditentukan sebelumnya. Kapasitas fiskal penting untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah dalam ranah keuangan dan patuh pada peraturan perundang-undangan (PMK Nomor 65 Tahun 2024).	KFD = (pendapatan + penerimaan pembiayaan) – (pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran).	Rasio

Populasi penelitian ini meliputi seluruh 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2024, sehingga membentuk data panel (*pooled data*) yang merupakan kombinasi data lintas wilayah (*cross section*) dan runtut waktu (*time series*). Sampel penelitian menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling), karena seluruh populasi kabupaten/kota dijadikan sebagai unit analisis, sehingga seluruh kabupaten/kota dimasukkan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan representatif. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen dokumentasi, berupa lembar pencatatan dan tabulasi data sekunder yang diperoleh dari PMK tentang Kapasitas Fiskal Daerah, publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Sementara Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) meliputi uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), analisis koefisien determinasi (R^2), uji hipotesis (uji t , uji f). Sebelum dianalisis, instrumen diuji menggunakan validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan

akurat, konsisten, dan layak digunakan dalam analisis jalur (*Path Analysis*). Teknik analisis dilakukan terhadap 2 sub struktural. Sub struktural I menguji pengaruh variabel independen terhadap intervening. Sub struktural II menguji pengaruh variabel independen dan intervening terhadap dependen.

Hasil

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Uji Normalitas

Sub Struktural I	
N	135
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	,200
Sub Struktural II	
N	135
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	,066

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig.*) untuk sub struktural I sebesar 0,200 dan sub struktural II sebesar 0,066, kedua nilai tersebut > dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual model berdistribusi normal.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics			Keterangan
Tolerance	VIF		
Sub Struktural I			
INV	,775	1,290	Tidak ada multikolinearitas
BM	,775	1,290	Tidak ada multikolinearitas
Sub Struktural II			
INV	,394	2,539	Tidak ada multikolinearitas
BM	,448	2,233	Tidak ada multikolinearitas
PDRB	,237	4,222	Tidak ada multikolinearitas

Berdasarkan table 4, nilai pada sub struktural I menunjukkan *tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10, begitupun dengan sub struktural II. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua sub struktural dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

		Sig.	Keterangan
Sub Struktural I	INV	,545	Tidak ada heteroskedastisitas
	BM	,241	Tidak ada heteroskedastisitas
Sub Struktural II	INV	,773	Tidak ada heteroskedastisitas
	BM	,248	Tidak ada heteroskedastisitas
	PDRB	,318	Tidak ada heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi untuk seluruh variabel independen dalam model sub struktural I dan II memiliki nilai signifikansi (*Sign.*) > 0,05. Sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Sub Struktural I		Sub Struktural II	
Durbin Watson	,795	Durbin Watson	1,467

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 0,795 dan 1,467 yang berarti nilai Durbin Watson berada di antara -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada penelitian ini.

Analisis Jalur (Path Analysis)

Penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) untuk mengetahui pengaruh antar variabel, yaitu menentukan apakah hubungan tersebut terjadi secara langsung atau pun secara tidak langsung melalui variabel mediasi (*intervening*). Berikut merupakan hasil pengolahan data menggunakan SPSS.

Tabel 7. Koefisien Jalur

Regresi	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient Beta	R²	Uji T		Uji F	
	B	Std. Error			T	Sig.	F	Sig.
Sub Struktural I								
(Constant)	5,173	,363		,760	14,263	<,001	212,657	<,001
INV → PDRB	,199	,018	,544		11,307	<,001		
BM → PDRB	,654	,067	,473		9,826	<,001		
Sub Struktural II								
(Constant)	-2,430	,450		,394	-5,398	<,001	30,006	<,001
INV → KFD	,021	,019	,119		1,113	,268		
BM → KFD	,227	,068	,334		3,324	,001		
PDRB → KFD	,128	,068	,261		1,890	,061		

Berdasarkan Tabel 7, pada model struktural I variabel investasi (INV) dan belanja modal (BM) berpengaruh positif serta signifikan terhadap PDRB, dengan nilai signifikansi masing-masing < 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi dan belanja modal mampu mendorong pertumbuhan PDRB. Nilai R² sebesar 0,760 menandakan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat. Pada model struktural II, hanya belanja modal (BM) yang berpengaruh signifikan terhadap KFD (sig. = 0,001), sedangkan investasi (INV) dan PDRB tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Nilai R² sebesar 0,394 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 39,4% variasi KFD. Berikut merupakan model yang didasarkan pada hasil koefisien jalur.

Tabel 8. Model Struktural Path Analysis

Sub Struktural I	$\text{LnPDRBt-1} = 0,544\text{LnINVt-1} + 0,473\text{LnBMt-1} + \varepsilon_1$
Sub Struktural II	$\text{LnKFDt} = 0,119\text{INVt-1} + 0,334\text{BMt-1} + 0,261\text{PDRB t-1} + \varepsilon_2$

Berdasarkan sub struktural I, nilai koefisien jalur INV sebesar 0,544 berarti bahwa investasi mempunyai arah pengaruh positif terhadap PDRB, apabila investasi naik sebesar 0,544%. Sedangkan nilai koefisien jalur BM sebesar 0,473 artinya ketika belanja modal naik 1% maka PDRB naik sebesar 0,473%. Begitupun untuk substruktural II, apabila investasi naik 1% maka KFD naik sebesar 0,119%, apabila belanja modal naik sebesar 1% maka KFD naik 0,334%, serta apabila PDRB naik sebesar 1% maka KFD naik sebesar 0,261%. Setelah nilai koefisien jalur diperoleh, maka pengaruh langsung dan tidak langsung sudah dapat ditentukan seperti pada tabel berikut.

Tabel 9. Koefisien Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung
INV → PDRB	0,544	-
BM → PDRB	0,473	-
INV → KFD	0,119	-
BM → KFD	0,334	-
PDRB → KFD	0,261	-
INV → PDRB → KFD	-	$(0,544) \times (0,261) = 0,14198$
BM → PDRB → KFD	-	$(0,473) \times (0,261) = 0,12345$

Berdasarkan Tabel 9, investasi (INV) memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap PDRB sebesar 0,544, sementara belanja modal (BM) juga berpengaruh positif langsung terhadap PDRB sebesar 0,473. Pengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal daerah (KFD) terlihat lebih rendah, yaitu INV sebesar 0,119 dan BM sebesar 0,334, sedangkan PDRB berpengaruh langsung terhadap KFD sebesar 0,261. Selain itu, terdapat pengaruh tidak langsung melalui PDRB, yaitu $INV \rightarrow PDRB \rightarrow KFD$ sebesar 0,142 dan $BM \rightarrow PDRB \rightarrow KFD$ sebesar 0,123. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB berperan sebagai variabel *intervening* yang memperkuat pengaruh investasi dan belanja modal terhadap kapasitas fiskal daerah

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 10. Uji T

	thitung	ttabel	Sig.	Keterangan
Sub Struktural I				
INV $\rightarrow$ PDRB	11,307	1,97810	<,001	Signifikan
BM $\rightarrow$ PDRB	9,826	1,97810	<,001	Signifikan
Sub Struktural II				
INV $\rightarrow$ KFD	1,113	1,97824	,268	Tidak Signifikan
BM $\rightarrow$ KFD	3,324	1,97824	,001	Signifikan
PDRB $\rightarrow$ KFD	1,890	1,97824	,061	Tidak Signifikan

Berdasarkan hasil uji t pada sub struktural I dan II dapat disimpulkan bahwa: 1). Investasi memiliki thitung sebesar 11,307 yang lebih besar dari ttabel sebesar 1,97810 serta nilai signifikansi <0,001 yaitu lebih kecil dari 0,05. Sehingga investasi berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. 2). Belanja modal memiliki thitung sebesar 9,826 yang lebih besar dari ttabel sebesar 1,97810 serta nilai signifikansi <0,001 yaitu lebih kecil dari 0,05. Sehingga belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. 3). Investasi menunjukkan nilai thitung sebesar 1,113 lebih kecil dibandingkan ttabel bernilai 1,97824, selain itu nilai signifikansinya berada di atas 0,05 yaitu sebesar 0,268 berarti investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap KFD. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak. 4). Belanja modal memperlihatkan thitung > ttabel yaitu $3,324 > 1,97824$. Selain itu nilai signifikansinya berada di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,001 berarti belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap KFD. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. 5). PDRB memiliki nilai thitung < ttabel yaitu $1,890 < 1,97824$ serta signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,061 menunjukkan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap KFD. Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 11. Uji F

	Fhitung	Sig.	Ftabel	Keterangan
Sub Struktural I				
INV, BM $\rightarrow$ PDRB	212,567	<,001	3,06	Signifikan
Sub Struktural II				
INV, BM, PDRB $\rightarrow$ PDRB	30,006	<,001	2,67	Signifikan

Berdasarkan hasil pada uji f pada tabel di atas, model pada sub struktural I mempunyai nilai signifikansi (Sig.) sebesar <0,001 dan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu $212,567 > 3,06$. Berdasarkan nilai tersebut, membuktikan bahwa investasi dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Begitupun pada sub struktural II menunjukkan nilai signifikansi <0,001 dan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu $30,006 >$

2,67 yang juga membuktikan investasi, belanja modal, dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Tabel 12. Uji R^2

	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Sub Struktural I				
INV, BM → PDRB	,874	,763	,760	,48004
Sub Struktural II				
INV, BM, PDRB → PDRB	,638	,407	,394	,37373

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur sebesar apa kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari tabel dapat dilihat bahwa pada sub struktural 1 memiliki nilai *adjusted R square* sebesar 0,760 atau 76%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel INV dan BM mampu menjelaskan variabel PDRB sebesar 76%, sedangkan sisanya 24% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Sementara pada sub struktural II menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,394 atau 39,4%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel INV, BM dan PDRB mampu menjelaskan variabel PDRB sebesar 39,4%, sedangkan sisanya 60,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh investasi terhadap PDRB memiliki koefisien jalur sebesar 0,544. Selain itu, hasil uji statistik t menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 11,307 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,977961 serta nilai signifikansi berada pada nilai $<0,001$ lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian, peningkatan investasi pada periode tertentu akan memberikan pengaruh pada kenaikan produk domestik regional bruto pada periode yang sama. Investasi baik dari PMDN maupun PMA membawa bertambahnya barang modal dan faktor produksi baru yang akan meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga kegiatan ekonomi di suatu wilayah akan terdorong (Manurung, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh positif signifikan investasi terhadap PDRB (Christono et al., 2021).

Pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan hasil analisis jalur menunjukkan koefisien jalur pengaruh belanja modal terhadap PDRB sebesar 0,473 dengan signifikansi berada pada nilai $<0,001$ yang lebih kecil dari 0,05 serta t_{hitung} sebesar 9,826 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,97810 menunjukkan pengaruh positif signifikan. Hal ini berkaitan dengan peran pengeluaran pemerintah yang menciptakan permintaan agregat. Belanja modal pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur strategis bertindak sebagai suntikan dana dalam aliran sirkuler ekonomi yang menstimulasi permintaan agregat. Siklus perputaran uang yang bermula dari belanja publik ini pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan *output* ekonomi daerah secara keseluruhan yang tercermin dalam kenaikan PDRB. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu (Apriyanti et al., 2026). Temuan pengaruh positif signifikan juga dihasilkan oleh (Indriasih et al., 2023).

Pengaruh Investasi terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Berdasarkan hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh investasi terhadap PDRB memiliki koefisien jalur sebesar 0,119. Meskipun arah pengaruh positif, namun nilai signifikansinya sebesar 0,268 berada di atas 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar 1,113 lebih kecil dibandingkan t_{tabel} bernilai 1,97824 sehingga secara statistik tidak berpengaruh signifikan. Kondisi ini dapat terjadi karena proses investasi menuju peningkatan kapasitas fiskal melalui PAD terhalang oleh kondisi iklim investasi di Jawa Barat. Investasi yang masuk ke Jawa Barat lebih dominan investasi padat modal khususnya sektor listrik, gas, air, mineral non logam, transportasi, konstruksi dan telekomunikasi yang terpusat di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Investasi yang masuk ke suatu daerah dapat dikategorikan menjadi investasi padat modal dan investasi padat karya (Hartoyo et al., 2025). Oleh karena itu, investasi lebih memiliki potensi lebih besar sebagai penciptaan lapangan kerja dibandingkan investasi padat modal. Temuan pengaruh positif signifikan investasi terhadap kapasitas fiskal daerah juga ditemukan pada penelitian (Ernawati et al., 2025).

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Analisis statistik menunjukkan bahwa koefisien pengaruh belanja modal terhadap KFD sebesar 0,334 serta $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,324 > 1,97824$ dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,001. Uji statistik ini menunjukkan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap KFD. Pelaksanaan belanja modal mendorong aktivitas sektor konstruksi dan sektor terkait dan menjalankan aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik akan mampu meningkatkan PAD yang pada akhirnya KFD ikut menguat. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang juga menemukan hasil pengaruh positif signifikan belanja modal terhadap kapasitas fiskal daerah (Maghfira et al., 2025).

Pengaruh PDRB terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Analisis statistik menunjukkan koefisien pengaruh sebesar 0,261 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,890 < 1,97824$ dengan signifikansi sebesar 0,061 masih lebih besar dibandingkan 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap KFD. Hal ini dapat terjadi karena meskipun PDRB sebagai cerminan perekonomian suatu daerah, tetapi tidak selalu mencerminkan kemampuan daerah dalam bentuk kapasitas fiskal. PDRB hanya menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi wilayah, tetapi tidak memastikan bahwa aktivitas tersebut menjadi sumber pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah (Ernawati et al., 2025). PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagian besar didominasi oleh sektor-sektor yang menjadi kewenangan pusat dalam hal pemungutan daerah, sehingga daerah hanya mendapatkan bagian pendapatan yang terbatas, maka dari itu tingginya PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap KFD.

Pengaruh Investasi terhadap Kapasitas Fiskal Daerah melalui PDRB

Berdasarkan pengujian analisis jalur, ditemukan bahwa PDRB tidak mampu memediasi pengaruh investasi terhadap KFD secara signifikan. Meskipun pada jalur pertama ditemukan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, namun pada jalur kedua, PDRB tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap KFD. Hal ini menunjukkan adanya mata rantai yang terputus (*broken link*) dalam proses transmisi ekonomi di Jawa Barat, di mana peningkatan produktivitas wilayah yang dipicu oleh modal swasta tidak mampu dikonversi menjadi penguatan kapasitas keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kapasitas Fiskal Daerah melalui PDRB

Belanja Modal pemerintah berfungsi sebagai penggerak awal ekonomi. Alokasi anggaran untuk infrastruktur fisik di Jawa Barat terbukti efektif menciptakan aktivitas ekonomi di sektor konstruksi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas masyarakat yang tercermin pada kenaikan PDRB. Namun, dampak ekonomi ini berhenti pada level kesejahteraan masyarakat dan nilai tambah bruto. Jalur mediasi menuju KFD terputus karena pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh belanja modal tersebut tidak mampu dijarah kembali secara optimal melalui instrumen pajak daerah

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1). Secara langsung, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa stimulus investasi PMDN dan PMA berhasil menambah kapasitas produksi dan meningkatkan nilai tambah PDRB. 2). Secara langsung, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 3) Secara langsung, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 4). Secara langsung, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 5). Secara langsung, PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 6) Secara tidak langsung, PDRB tidak mampu memediasi pengaruh investasi terhadap kapasitas fiskal daerah. Ini didasarkan pada hasil analisis jalur yang menemukan bahwa PDRB tidak mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap KFD. 7). Secara tidak langsung, PDRB tidak mampu memediasi pengaruh belanja modal terhadap kapasitas fiskal daerah.

Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya optimalisasi investasi dan belanja modal untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan PDRB di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Hasilnya dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berbasis pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan penelitian ini kemungkinan terletak pada cakupan wilayah, periode waktu, serta variabel yang digunakan. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain seperti PAD, transfer pusat, atau kualitas belanja, serta memperluas objek dan periode penelitian.

Acknowledgement

-

Daftar Pustaka

- Andriyansyah, Ibrahim, R., & Abdullah, S. (2019). The influence of regional expenditures toward economic growth of district/city governments in Aceh. Indonesia. *East African Scholars Multidiciplinary*, 2(12), 401–411.
<https://doi.org/10.36349/easmb.2019.v02i12.004>
- Apriyanti, M., Mahmudi, B., & Suryani, E. (2026). Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Intervening. *Journal Social Society*, 6(1), 460–476. <https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.1006>
- BPS. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Indonesia (Vol. 15).

- Christono, A. B., & Putri, D. D. (2022). Pengaruh Konsumsi dan Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi DKI Jakarta periode 2010-2019. *Journal of Economics and Business UBS*, 11(1), 8-14.
- Ernawati, E., & Mulyani, S. (2025). Pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, dan investasi terhadap kapasitas fiskal daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(6), 3056-3068. <https://doi.org/10.60036/jbm.888>
- Hartoyo, H., Putra, A., Fahmi, A., & Nurkodri, M. S. (2025). Analysis of the Effect of Gross Regional Domestic Product and Regional Expenditure on Local Own-Source Revenue in Jambi City. *Jurnal Prajaiswara*, 6(2), 540-553. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v6i2.218>
- Herdiyana, D. (2019). Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 22-22. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.610>
- Indriasih, D., Muttaqin, I., Fajri, A., & Prastyono, Y. (2023). Regional Investment, Capital Expenditure, General Transfer Funds, Economic Growth Rate, And Regional Original Income All Have An Impact On The Degree Of Regional Fiscal Independence: Case Study in Regencies/Cities in Central Java Province 2017–2021 Period. In *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)* (pp. 245-255). <https://doi.org/10.31328/cebi.v3i1.320>
- Istiningsih, W. D., & Bawono, A. D. B. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Pada Periode 2019-2020. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 349-355. <https://doi.org/10.34308/eqien.v10i2.605>
- Koerniawan, R. N. R., & Tallo, A. J. (2020). Peranan Sektor Lapangan Usaha Dalam Meningkatkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Dki Jakarta Periode Tahun 2015-2019. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(3), 351. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.3.351-356.2020>
- Maghfira, A., & Afandi, A. (2025). Pengaruh Environmental Social and Governance (ESG), Keputusan Investasi dan Kebijakan Dividen terhadap Return Saham. *Journal Social Society*, 5(2), 1460–1471. <https://doi.org/10.54065/jss.5.2.2025.905>
- Manurung, Z. F. B. (2023). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2010-2020. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(3), 751-760. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i3.4213>
- Panggabean, J. S. E. A., Mahendra, A., & Setyaningsih, K. J. (2025). Peran Kapasitas Fiskal, Dependensi Fiskal pada Pemerintah Pusat, dan Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat: Studi Lintas Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. *EQUILIBRIUM-Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(2), 279-290. <https://doi.org/10.61179/ejba.v19i2.789>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 4 (2024).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).

- Putri, I. R., & Simamore, V. T. (2026). Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Tas Koper Lokal pada PT. Anugrah berkah Bersama Apan di Cibirong. *Journal Social Society*, 6(1), 541–555.
<https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.1023>
- Rahayu, T., Tobing, R. D., Sinaga, O. S., & Suharianto, J. (2025). Analisis Mediasi Pengaruh Belanja Daerah dalam Pengaruh Belanja Modal dan Investasi PMDN Terhadap PDRB Sumatera Utara 2011-2024. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 632-643.
<https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i3>
- Reza, M., & Sopiana, Y. (2023). Analisis PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(1), 477-488.
- Saparmar, S., Syapsan, S., & Tampubolon, D. (2022). Pengaruh Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau Tahun 2011-2020. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 70-78.
<https://doi.org/10.34308/eqien.v9i1.310>
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 2, pp. 51-64).
- Simamora, D. (2025). From capital to equality: evaluating how foreign direct investment and domestic direct investment influence the gini ratio in Bandung Regency (2011–2024). *Jurnal Mantik*, 9(3).
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian baru*. Rajawali Pers.
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193-210.
<https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>
- Syaifullah, S. (2021). Analisis Kapasitas Fiskal Kabupaten Langkat. *BONANZA: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Bisnis dan Keuangan*, 1(2), 24-29.
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (2007).
- Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. In *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 23, No. 4, pp. 688-699). <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233>